

JEJARING MUHAMMADIYAH (Sebuah Analisis Recovery Bencana Merapi Yang Dilakukan Organisasi Muhammadiyah)

Nuruddin Al Akbar¹

Abstract

This article is based on the research conducted by the writer in Desember 2010 until January 2011. The objective of the research is to know: 1) How was Muhammadiyah as an Islamic social organization involved in handling the recovery program (post Merapi eruption) in 2010. 2.) How was Muhammadiyah used it's network in the recovery program.

The research belongs to case study. The research employed two techniques to collect the data; 1.) interview, and 2.) overview. After the data was gathered, the data was analyzed by the descriptive qualitative techniques.

Some of the important search findings can be stated as follow: 1.) Muhammadiyah as an Islamic social organization was actively involved in the recovery program at post Merapi eruption by delivering human resources and material resources. 2.) Muhammadiyah created MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Centre) to optimize or maximize the effect of handling the recovery program.

Kata Kunci : Muhammadiyah, recovery, network

Pendahuluan

Bencana erupsi Merapi yang terjadi pada tahun 2010 menunjukkan sebuah fakta penting, yaitu makin kuatnya aktor non-negara dalam penanggulangan bencana. Ikut sertanya berbagai LSM/NGO, Partai politik, hingga perusahaan dalam penanggulangan bencana menjadi bukti nyata yang tidak terbantahkan. Keberadaan berbagai lembaga tersebut sejatinya juga menunjukkan adanya keterbatasan yang dimiliki negara dalam melakukan aksi penanggulangan bencana. Sebagai contoh, terbatasnya sumber daya yang

¹ Peneliti Muda di Jurusan Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada

dimiliki pemerintah, yaitu alat transportasi, seperti yang terjadi di Mentawai, menimbulkan permasalahan yang serius dalam konteks penanggulangan bencana. Kelemahan negara di berbagai sisi tersebut ternyata mampu diisi oleh lembaga-lembaga non-negara, sehingga lembaga non-negara mempunyai fungsi komplementer terhadap negara.

Salah satu lembaga non-negara yang berperan dalam penanggulangan bencana adalah persyarikatan Muhammadiyah. Organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta ini mempunyai peranan yang signifikan dalam berbagai bidang, mulai dari keagamaan, politik, sampai penanggulangan bencana. Organisasi yang mengklaim memiliki sekitar 30 juta pengikut ini tercatat telah malang-melintang dalam berbagai penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia seperti di Aceh, Wasior, dan Bantul. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan seharusnya memiliki peranan yang signifikan dalam upaya penanggulangan bencana Erupsi Merapi, termasuk dalam tahapan *recovery*. Ada beberapa alasan yang menguatkan keyakinan itu, yaitu: *Pertama* Muhammadiyah mempunyai tugas untuk melaksanakan *Amar ma'ruf nahi Munkar*, terkhusus dalam bidang kemasyarakatan. Hal inilah yang kemudian menjadikan Muhammadiyah terdorong untuk mendirikan berbagai rumah sakit, balai pengobatan, panti asuhan, dan kegiatan lainnya. Dalam konteks bencana yang terjadi di Indonesia terkhusus Merapi secara otomatis seharusnya Muhammadiyah terlibat secara aktif dalam berbagai upaya pendampingan masyarakat.

Kedua, Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang mengidentifikasikan dirinya sebagai gerakan *tajdid* (pembaharuan) dan dikenal anti TBC (*Takhayul-Bid'ah-Churofat*), dimana aspek pentingnya adalah adanya penolakan terhadap paham klenik dan mistik. Gerakan *tajdid* ini semestinya menjadi landasan Muhammadiyah dalam melaksanakan penanggulangan bencana terkhusus dalam tahap *recovery* sehingga di masa yang akan datang diharapkan dapat merubah paradigma yang terbangun pada sebagian masyarakat tentang bencana yang dalam kacamata *tajdid* masih menyimpan berbagai praktek yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam.

Basis keagamaan yang kuat dalam upaya *recovery* bencana ternyata diuntungkan dengan adanya jaringan kuat yang dimiliki Muhammadiyah di Indonesia. Ini terbukti dengan tersebarnya berbagai macam amal usaha Muhammadiyah di berbagai tempat seperti rumah sakit, Perguruan tinggi, sekolah, hingga taman kanak-kanak. Jaringan luas ini dalam banyak hal telah dipakai Muhammadiyah untuk mensukseskan programnya. Ambil contoh Muktamar Muhammadiyah 1 Abad yang berlangsung di Yogyakarta yang berlangsung cukup meriah dan spektakuler. Muhammadiyah misalnya, menggunakan gedung UMY sebagai tempat pertemuan, sekolah-sekolah

Muhammadiyah menampilkan aksinya dalam pagelaran di stadion Mandala Krida, tim dari rumah sakit PKU mendampingi berlangsungnya acara, sampai halaman masjid Muhammadiyah yang dipakai sebagai tempat penginapan sementara bagi warga Muhammadiyah yang datang jauh-jauh dari luar Jawa. Fenomena ini sebenarnya menunjukkan bahwa jaringan yang dimiliki Muhammadiyah mempunyai potensi untuk diberdayakan secara luar biasa.

Tulisan ini berupaya untuk menelusuri penanganan korban erupsi Merapi dalam konteks *recovery* yang dilakukan oleh Organisasi Muhammadiyah. Dengan mengaitkan proses *recovery* oleh Muhammadiyah ini dalam kerangka teori jaringan. Dimana posisi Muhammadiyah menjadi penting sebagai salah satu actor non pemerintah, yang mempunyai potensi besar mendayagunakan jaringannya untuk bertindak cepat dan dalam skala yang cukup komprehensif, guna membantu penanggulangan bencana Merapi.

Governance dan Penanggulangan Bencana

Peran negara sebagai satu-satunya aktor tunggal yang mampu melaksanakan segala hal mulai hilang relevansinya saat ini. Kekhawatiran akan ambruknya perekonomian diakibatkan pengeluaran negara yang terlalu besar mengakibatkan gagasan baru pembangunan mulai diperhitungkan. Margaret Thatcher dan Ronald Reagan sebagai pemimpin pemerintahan segera melaksanakan pembaharuan ekonomi yang kemudian dikenal sebagai *Reaganomic* dan *Thatcherism*. Keduanya sepakat bahwa peran negara haruslah diminimalisir dan penguatan peran sektor swasta².

Pelemahan negara seakan makin menjadi dengan diterbitkannya sebuah laporan dari *World bank* yang berjudul *Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth* dimana laporan ini menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika ada sinergi dari tiga aktor (negara, bisnis, dan Civil society) dan peran pemerintah sebagai fasilitator³. Disini dapat ditarik poin penting dari *Governance* yaitu adanya penguatan aktor-aktor non-negara, dan berfungsinya lembaga negara secara baik. adanya keterlibatan aktor non-negara menjadi penting untuk mengimbangi negara yang dianggap sebagai biang keladi kegagalan pembangunan.

Penerapan gagasan *Governance* dalam konteks penanggulangan bencana seakan mendapatkan relevansinya. Penguatan peran aktor non-negara dan relasinya dengan negara dapat dirangkum menjadi satu poin penting yaitu *partnership*. Poin penting ini ditegaskan oleh Alex B. Brillantes:

² Rachel S. Turner, *Neo-Liberal Ideology History, Concepts and Policies*, (Edinburgh: Edinburgh University Press), hal. 107.

³ Pratikno, "Good Governance dan Governability", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (Nomor 3, Volume VIII, Maret 2005), hal. 234.

...partnership is a key pillar of good governance. Partnerships may be between various levels of government (national-local, local-local), or partnerships between government and civil society (government-non-government)....⁴

Partnership disini diartikan sebagai adanya keterkaitan yang erat antara pemerintah dengan aktor-aktor yang lain termasuk organisasi non-negara. Kerjasama ini menjadi begitu penting mengingat actor negara dalam proses penanggulangan bencana terkhusus *recovery* dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Keterbatasan inilah yang menjadi lahan garapan berbagai organisasi/actor non-negara dalam melaksanakan aksinya.

Peran lembaga non-negara dapat mencakup berbagai aspek dan kegiatan seperti penyediaan tempat penampungan sementara, mengatasi rasa trauma warga dengan menyediakan hiburan yang dikenal merakyat seperti musik dangdut, humor, pemutaran film, dan kegiatan lainnya. Berbagai aspek yang diambil lembaga-lembaga tersebut juga mempunyai kaitan erat dengan basis pemikiran yang dimiliki oleh masing-masing organisasi. Sebagai contoh, seniman mencoba melakukan *trauma-healing* dengan mengadakan pentas seni. Sebaliknya partai politik lebih difokuskan pada upaya advokasi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan diteruskan ke lembaga legislatif dan eksekutif.

Recovery dan Pengurangan Resiko Bencana

Salah satu proses terpenting dalam penanggulangan bencana adalah proses *recovery*. Akan tetapi sebagian kalangan masih menganggap bahwa *recovery* hanyalah merupakan persoalan rekonstruksi bangunan maupun kebutuhan dasar warga yang terkena bencana. Pemahaman seperti ini sebenarnya menyimpan potensi bahaya besar di kemudian hari, ketika terjadi bencana yang sama untuk kedua kalinya masyarakat akan kembali mengalami situasi yang sama dan akan mengulangi langkah yang sama di masa lampau. Sebuah pernyataan menarik pernah diungkapkan oleh filsuf Inggris George Bernard Shaw yang menyatakan "*Dari sejarah kita tahu bahwa kita tidak pernah belajar dari sejarah*". Ungkapan tersebut sebenarnya dapat digunakan untuk melihat penanganan bencana yang terjadi selama ini, dimana cara pikir yang ada adalah mengembalikan bangunan dan kebutuhan dasar warga, dan sama sekali tidak memasukkan unsur "*learning*" dari bencana yang telah terjadi.

Keprihatinan akan persoalan cara pikir ini juga disampaikan oleh Andrew Maskrey:

⁴ Alex B. Brillantes, *Partnerships: A Key Pillar Of Good Governance*". Monograph: From Government to Governance, hal. 89.

Major disasters move societies and governments to create risk management systems and institutions, but in many cases their resources, influence and political strength tend to weaken when the memory of the disaster begins to vanish (and this happens very rapidly) ... But despite that, the existence of those systems is an advance in terms of society's provision for disaster preparedness and response, but the tendency is that in practice these systems concentrate efforts in emergency response not in changing the conditions that create risks that become disasters⁵

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pengurangan risiko bencana adalah hal yang penting dalam proses *recovery* tanpa melupakan aspek umumnya (mengembalikan kebutuhan dasar) sehingga kondisi paska bencana akan didapatkan suatu keadaan "normal" yang telah dilengkapi dengan kesadaran baru akan bencana.

Upaya pengintegrasian pengurangan risiko bencana sebenarnya telah menjadi bagian dari kesadaran internasional. Salah satunya ditegaskan dalam pertemuan di Hyogo Jepang, dimana menghasilkan "cetak biru global" mengenai pengurangan resiko bencana yang disebut Kerangka Aksi Hyogo. Paling tidak ada tiga tujuan strategis dari Kerangka Aksi Hyogo, dimana poin ketiga menjelaskan perlunya pengintegrasian pengurangan potensi bencana pada saat tanggap darurat, *preparedness*, dan program *recovery*⁶

Manajemen Jaringan

Terjadi perubahan besar pada pola pengaturan kelembagaan dari bentuk yang amat hierarkis dan *top down* menjadi apa yang disebut model jaringan (*network*). Model baru ini seolah memperoleh momentumnya akibat adanya berbagai peristiwa mutakhir yang mau tidak mau mendorong pengembangan model jaringan. Salah satu contoh dapat ditemukan pada peristiwa merebaknya berbagai wabah mematikan di dunia, seperti kasus Anthrax, Flu Burung, dan Flu Babi. Berbagai wabah yang merebak tentunya tidak dapat hanya ditangani oleh Departemen Kesehatan, akan tetapi membutuhkan kerjasama pihak bandara sebagai pintu masuk bagi *suspect* penyakit dari luar negeri. Penanggulangan tersebut juga membutuhkan dukungan masyarakat, yang termanifestasi dengan melapor ketika ada unggasnya yang mati mendadak.

Akan tetapi upaya pembentukan jaringan tidak secara spontan dapat terlaksana begitu saja. Ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam

⁵ Alex B. Brillantes, *Learning from Disaster Recovery Guidance for Decision Makers*, A Publication from the International Recovery Platform (IRP) Supported by the Asian Disaster Reduction Center (ADRC), International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) secretariat and United Nations Development Programme (UNDP), May 2007, hal. 3.

⁶ *Ibid.*, hal. 7.

upaya penyusunan jaringan. Jika merujuk pada konsep *Networked government* paling tidak ada tiga tahap penting dalam memastikan jaringan berjalan dengan baik. *Tahap pertama* yang harus diperhatikan adalah mengenai bentuk model yang paling sesuai⁷. Paling tidak ada dua pertanyaan yang harus dijawab dalam memilih model, yaitu *pertama*: apa yang ingin kamu lakukan? Pertanyaan ini menyangkut tujuan dari dibentuknya network yang akan menentukan model seperti apa yang cocok⁸, *Kedua* apakah jaringan ini akan terus berlanjut ataukah untuk satu waktu tertentu saja. *Tahap kedua* adalah mengintegrasikan network. Disini ada sebuah pertanyaan penting mengenai siapa yang akan menjadi koordinator dalam jaringan⁹. *Tahap ketiga* adalah meng-*connect*-kan network yang ada¹⁰.

Muhammadiyah sebagai Gerakan Tajdid dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Konsep *Tajdid* yang dipahami Muhammadiyah adalah pembaharuan di bidang keagamaan dan sosial. Dalam konsep keagamaan, Muhammadiyah amat dikenal dengan sikapnya yang anti TBC (*Takhayul Bid'ah dan Churofat*)¹¹. Sikap tersebut diaplikasikan kepada masyarakat dengan upayanya memurnikan pemahaman yang menyimpang dari Qur'an dan Sunnah¹², Salah satu upaya yang dilakukan Muhammadiyah adalah upaya penghapusan berbagai tradisi yang mengakar di masyarakat namun tidak sesuai dengan al Qur'an dan Sunnah, seperti meniadakan kebiasaan menujuhbulani. Kebiasaan ini dilakukan pada masyarakat Jawa yang dianggap merupakan peninggalan dari tradisi Hindu-Budha¹³. Dalam sejarah Muhammadiyah, upaya penyiaran agama Islam dan pembersihan terhadap praktek-praktek menyimpang termanifestasikan dengan dibentuknya beberapa badan di Muhammadiyah seperti Majelis *Tarjih* yang fungsinya memberikan fatwa, sedangkan Majelis *Tabligh* yang tugasnya menyiarkan ajaran Islam

Selain *Tajdid*, Muhammadiyah juga mendasarkan gerakannya pada konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Konsep ini mempunyai makna pada upaya

⁷ William D. Eggers dan Stephen Gold Smith, "Government by Network The New Public Management Imperative", A Joint Study by Deloitte Research and the Ash Institute for Democratic Governance and Innovation at the John F. Kennedy School of Government at Harvard University, hal. 11.

⁸ Model disini merujuk pada Tipe jaringan antara Negara dengan Sektor Privat yang diikat oleh kepentingan tertentu seperti pengadaan barang.

⁹ *Ibid*, hal. 12.

¹⁰ *Ibid*, hal. 14.

¹¹ Sazali, *Muhammadiyah dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Psap, 2005), hal. 8.

¹² *Ibid*, hal. 68.

¹³ Musthafa Musthafa Kamal dkk, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, (Yogyakarta: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, 2000), hal. 54.

mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran¹⁴. Konsep ini melahirkan berbagai tindakan Muhammadiyah di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang sosial dan kemasyarakatan. Tercatat berbagai usaha telah dilakukan dalam bidang kemasyarakatan mencakup pendirian rumah sakit, balai kesehatan ibu dan anak, panti asuhan, penyuluhan pada keluarga¹⁵. Keluarga merupakan salah satu aspek yang amat diperhatikan oleh Muhammadiyah, karena asumsinya jika keluarga baik maka hal itu akan menyebabkan masyarakat akan menjadi baik pula.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan *case study* (studi kasus) sebagai metode penelitiannya. Pemilihan metode ini dikarenakan peneliti mencoba untuk menjelaskan fenomena kontemporer yang tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya¹⁶. Dalam hal ini bagaimana Muhammadiyah terlibat dalam proses *recovery* paska meletusnya Merapi. Termasuk penulis juga ingin melihat bagaimana Muhammadiyah menggunakan jaringannya pada saat penanganan bencana, yang tentunya amat berbeda ketika kondisi normal ataupun saat berada dalam konteks lain seperti Muktamar.

Penelitian ini sendiri menggunakan dua cara dalam mengumpulkan data, yaitu: 1). Dengan melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, terkhusus yang tergabung di dalam MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Centre). 2). Melakukan observasi ke lapangan untuk melihat penerapan program Muhammadiyah tersebut.

Setelah terkumpul data tersebut dianalisis dengan teknik analisis kualitatif, dimana data dianalisis dengan cara diinterpretasikan sesuai tujuan penelitian yang sudah ditentukan. Pada tahap pengumpulan ini data-data diklasifikasikan berdasar beberapa kategori, yang kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Program Recovery Muhammadiyah

Dalam konteks bencana Merapi, Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi yang memiliki posisi yang cukup sentral. Mengingat Muhammadiyah merupakan organisasi yang lahir dan berakar kuat dalam masyarakat Yogyakarta, sehingga tentu Muhammadiyah sudah mengenal dengan baik karakter masyarakat Yogyakarta.

¹⁴ Sazali, *Muhammadiyah dan Masyarakat Madani*, hal.vi

¹⁵ Musthafa Kamal Pasha, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, hal. 57.

¹⁶ Robert K. Yin, *Case Study Research Design and Method* (California: Sage Publications, 2003), hal. 1.

Dalam konteks *recovery* Merapi, Muhammadiyah telah melaksanakan berbagai upaya yang dapat digolongkan ke dalam sejumlah bidang. Pembagian ini sekaligus menunjukkan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan Muhammadiyah akibat adanya berbagai lembaga/majelis dan organisasi otonom lain yang dilingkupi oleh Muhammadiyah. Paling tidak tercatat ada 4 bidang yang coba ditambah oleh Muhammadiyah pada tahapan *recovery*, yaitu pembangunan posko, Pendidikan, Keagamaan, dan pendampingan terpadu melalui konsep PKO.

a. Posko dan Pendidikan

Bidang pertama adalah pembangunan Posko. Sebenarnya program ini adalah lanjutan dari masa tanggap darurat. Hanya saja ketika pemerintah telah menurunkan status Merapi dan berakibat pada arus balik pengungsi di Sleman tersisa persoalan serius dimana banyak dari rumah warga yang hancur dan tidak dapat ditinggali lagi. Padahal *shelter* atau hunian sementara yang rencananya akan dibangun pemerintah belum terealisasi, sedangkan warga tidak mungkin hidup berkeliaran di alam bebas. Maka Muhammadiyah berupaya memastikan warga yang dapat ditangani Muhammadiyah mendapatkan tempat tinggal sementara. Untuk mensukseskan program ini maka Muhammadiyah menyediakan berbagai amal usahanya yaitu sekolah-sekolah dan gedung-gedung milik Muhammadiyah sebagai tempat tinggal sementara.

Bidang kedua adalah pendidikan yang merupakan salah satu bidang terpenting yang menjadi perhatian Muhammadiyah. Hal ini wajar mengingat Muhammadiyah memiliki berbagai sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi. Dalam tahapan *recovery* ini ada dua hal yang dilakukan Muhammadiyah yaitu *pertama*: memastikan murid-murid yang sekolahnya rusak dapat ditampung di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang dapat beroperasi. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak dapat kembali bercanda, mendapatkan pendidikan secara normal sehingga tidak terjadi rasa trauma akan bencana yang berkepanjangan. Untuk menghilangkan rasa trauma ini, Muhammadiyah menerapkan sejumlah langkah penting. Salah satu caranya dengan membaurkan murid-murid yang berasal dari sekolah yang rusak disatukan dengan anak-anak lain di sekolah yang masih beroperasi, sehingga harapannya tidak tercipta rasa minder jika disediakan kelas tersendiri khusus pengungsi.

Kedua, Muhammadiyah coba memasukkan kurikulum kebencanaan dalam pendidikan agar nantinya anak-anak yang bersekolah dapat menjadi pionir-pionir yang akan menyebarkan pengetahuan sadar bencana di wilayah masing-masing. Untuk mensukseskan program ini sudah tersedia modul elektronik dan LKS (Lembar Kerja Siswa) di kantor MDMC Pusat

Muhammadiyah, akan tetapi program ini belum berjalan sepenuhnya, dan baru diaplikasikan di wilayah Bantul dengan memasukkan kurikulum kegempaan.

b. Konsep People Kampong Organization (PKO)

Konsep ini bermakna pada pendampingan terpadu yang dilakukan Muhammadiyah dengan mengintegrasikan berbagai aspek seperti medis, pemberdayaan ekonomi, dan psikososial. Dalam hal medis, Muhammadiyah menyiapkan PKU yang berada di wilayah Sleman. Hingga memasuki fase *recovery* relawan medis PKU terus disiagakan, salah satunya lewat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cangkringan. Relawan yang berasal dari fakultas kesehatan UAD juga turut serta memberikan penyuluhan kesehatan kepada warga.

Selain medis, pendampingan terpadu juga memasukkan aspek psikososial. Muhammadiyah telah mengerahkan relawan-relawan yang umumnya berasal dari perguruan tinggi Muhammadiyah seperti UMS dan UAD. Kerja relawan tersebut juga dibantu oleh anggota Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) yang tergabung dalam berbagai organisasi seperti IMM dan IPM. Kerja relawan psikososial adalah mendampingi mental para korban agar tetap tenang dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus bunuh diri yang dilakukan pengungsi yang stress.

Demi menjaga berlangsungnya "kestabilan" psikis para pengungsi, maka kemanapun pengungsi pergi para relawan psikososial akan mengikuti. Fokus pemulihan psikososial yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sleman. Di Magelang pemulihan psikososial dilakukan di Dusun Polengan dan Dusun Kradenan. Sedangkan di daerah Boyolali pemulihan psikososial difokuskan di daerah Samiran Kecamatan Selo. Di daerah Sleman sendiri tahap pemuliahan psikososial dilakukan di Dusun Wonokerto dan Dusun Bangunkerto Kecamatan Turi serta di Dusun Purwobinangun Kecamatan Pakem. Fokus pemulihan psikososial yang akan datang difokuskan di Cangkringan, yakni di Pesalen, Pinglar, dan Guling.

Terkait Ekonomi, Muhammadiyah juga turut serta dalam melakukan pendampingan. Fokus pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui MDMC adalah di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sleman. Di Magelang pemulihan ekonomi dilakukan di Dusun Polengan dan Dusun Kradenan. Sedangkan di daerah Boyolali pemulihan ekonomi difokuskan di daerah Samiran Kecamatan Selo. Di daerah Sleman sendiri tahap pemulihan ekonomi dilakukan di Dusun Wonokerto dan Dusun Bangunkerto Kecamatan Turi serta di Dusun Purwobinangun Kecamatan Pakem.

Pemulihan ekonomi dilakukan dengan membekali masyarakat sekitar daerah bencana dengan ketrampilan lain seperti kerajinan yang terbuat dari kulit salak bagi petani salak. Hal lain yang dilakukan oleh MDMC adalah melakukan perencanaan dan pelatihan budidaya ikan dan kemudian menyuntikkan modal. Sumber pendanaan modal berasal dari Majelis Ekonomi LAZISMU dan bantuan dari pihak lain. Pemda Sleman dan CSR merupakan sumber dana lain dalam bantuan modal ke masyarakat. LAZISMU itu sendiri melakukan pembukaan rekening dengan dana dari masyarakat.

Muhammadiyah bahkan juga melakukan proses advokasi. Dimana saat bencana Merapi terjadi, banyak warga yang meninggalkan rumahnya dengan spontan tanpa membawa barang-barang berharga. Akibatnya banyak benda-benda penting, terkhusus surat-surat berharga yang hilang. Pada tahap *recovery* tercatat upaya yang dilakukan Muhammadiyah lewat koordinasi di SMK Muhammadiyah 2 Prambanan dengan mendata berbagai dokumen berharga seperti surat tanah, KTP, surat nikah, ijazah, raport sekolah.

c. Fatwa Muhammadiyah tentang Kurban

Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan telah melakukan berbagai hal terkait penanganan bencana dalam konteks keagamaan, seperti dikeluarkannya fatwa pada tanggal 29 Oktober 2010 yang terkait ibadah korban dan bencana. Dalam fatwa itu warga Muhammadiyah secara khusus dihimbau agar menggalang dana atau kepedulian bagi korban Merapi. Selain itu dalam khutbah atau ceramah seperti yang dilakukan Dien Syamsuddin selaku ketua Muhammadiyah, mengimbau untuk dilaksanakannya pertobatan nasional¹⁷. Pertobatan nasional ini terutama harus dilakukan oleh para pemimpin baik pemimpin formal dan pemimpin informal, dengan jalan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Dalam konteks *recovery*, peran Majelis *Tabligh* atau *Tarjih* belum nampak secara khusus, namun fatwa tersebut tentunya juga berlaku dalam konteks *recovery* agar masyarakat terus membantu korban Merapi.

2. Jejaring Muhammadiyah

Peran aktif Muhammadiyah dalam *recovery* bencana dengan berbagai programnya sebenarnya mengungkapkan sebuah kenyataan penting akan adanya sebuah "gurita" yang mempunyai banyak "tentakel". Jaringan yang luas ini sejatinya merupakan kunci kesuksesan terselenggaranya berbagai kegiatan yang saat ini diimplementasikan di lapangan. Adanya jejaring yang kuat dalam Muhammadiyah sebenarnya merupakan hal yang wajar sebab

¹⁷ "Muhammadiyah Kurban 1000 Sapi untuk Korban Merapi", <http://www.padang-today.com/?mod=berita&today=detil&id=22995> diakses tanggal 20 Desember 2010

organisasi ini telah berdiri sejak tahun 1912 dan melakukan ekspansi ke berbagai bidang. Kini paska muktamar Muhammadiyah yang menandai 100 tahun berjalannya organisasi ini jejaring yang dibangun Muhammadiyah begitu kuat.

a. Jaringan Penanggulangan Bencana Muhammadiyah

Pada dasarnya Muhammadiyah mempunyai sebuah struktur baku yang mirip dengan negara. Dimana struktur ini meliputi pengurusan dari tingkat nasional (Pimpinan Pusat Muhammadiyah), provinsi (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah), kabupaten/kota (Pimpinan Daerah Muhammadiyah), kecamatan (Pimpinan Cabang Muhammadiyah), dan desa (Pimpinan Ranting Muhammadiyah). Struktur hierarkis ini mempunyai sistem yang mirip negara. Yang perlu diperhatikan adalah kuatnya struktur yang dibangun hingga ke desa, sehingga dalam penyebaran informasi, misalnya, dapat dilakukan secara efektif.

Struktur internal kepengurusan Muhammadiyah sendiri dapat dibagi menjadi berbagai majelis dan lembaga. Keberadaan lembaga dan majelis inilah yang membawahi berbagai bidang-bidang tertentu di dalam organisasi. Salah satu Lembaga yang ada dalam struktur Muhammadiyah adalah lembaga Penanggulangan Bencana, yang bertanggung jawab dalam berbagai persoalan terkait kebencanaan. Pada tahun 2007, paska terjadinya berbagai bencana besar yang terjadi di Indonesia, dibentuklah badan baru di bawah komando Lembaga Penanggulangan Bencana yaitu MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Centre). MDMC sendiri mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga di bawah struktur Muhammadiyah.

Sebagai lembaga baru yang dibentuk, MDMC dapat dikatakan sebuah terobosan yang dilakukan Muhammadiyah dengan mengadopsi model jaringan. Jika merujuk pada upaya pembangunan jaringan berdasar konsep *networked government* maka pada awal pembuatan jaringan haruslah dimulai dengan mendefinisikan tujuan yang hendak dicapai. Penanggulangan bencana yang dilakukan Muhammadiyah sebenarnya adalah salah satu upaya dari *Amar Ma'ruf nahi Munkar* yang prosesnya bersifat terus menerus. Berbagai lembaga dan majelis yang ada dalam Muhammadiyah mempunyai bagian-bagian khusus yang semuanya berlomba-lomba melakukan *Amar Ma'ruf nahi Munkar*. Maka jaringan yang terbentuk sebenarnya merepresentasikan dari ideologi Muhammadiyah itu sendiri yang berusaha mewadahi segala upaya lembaga dan majelis yang begitu banyak menjadi suatu kesatuan yang terpadu dalam konteks penanggulangan bencana.

Aspek kedua dalam pembentukan jaringan adalah bagaimana mengintegrasikan lembaga-lembaga yang ada menjadi sebuah jaringan yang kuat? Dalam hal ini dibutuhkan sebuah koordinator yang kuat. Inilah yang menjadi tugas dari MDMC selaku koordinator dari berbagai lembaga yang ada di dalam tubuh Muhammadiyah. Basis legitimasi sendiri diberikan lewat keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sebagai pengurus tertinggi dalam tubuh organisasi. Keberadaan MDMC sebagai koordinator sangatlah signifikan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kesimpangsiuran yang menyebabkan program *recovery* menjadi kacau.

Aspek terakhir adalah persoalan *connecting*, dimana harus ada jaminan terjadi komunikasi diantara semua lembaga yang ada sehingga network tetap berjalan dengan baik. Dalam hal ini ada beberapa langkah yang dilakukan oleh MDMC. Pertama dengan memposisikan MDMC sebagai "jalur" pertukaran informasi. Segala bentuk kegiatan, relawan, ataupun barang yang masuk diberikan kepada MDMC atau dilaporkan. Kemudian MDMC akan melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga agar bantuan, relawan, atau program dapat terintegrasi dengan baik. Kedua, melalui cara tradisional yaitu tatap muka, seperti diadakannya rapat. Terkhusus hubungan MDMC dengan PP Muhammadiyah dilakukan rapat rutin untuk memantau perkembangan dan program yang berjalan.

b. Jaringan Luar Muhammadiyah: Penerapan Konsep Partnership

Jaringan penanggulangan bencana yang dibangun Muhammadiyah dengan MDMC sebagai koordinatornya tidak berhenti pada tataran internal organisasi saja. Dalam perkembangannya, sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana secara lebih luas, Muhammadiyah mengikutsertakan aktor-aktor luar dalam jejaringnya. Paling tidak ada dua kalangan yang diikutsertakan dalam jejaring Muhammadiyah. Pertama adalah pemerintah. Dalam konteks Merapi, Muhammadiyah melakukan kerjasama dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dengan saling bertukar informasi mengenai keadaan gunung berapi, info pengungsi, daerah rawan bencana. Kerjasama Muhammadiyah dan pemerintah ini dianggap penting bagi Muhammadiyah mengingat pemerintah termasuk aktor yang berperan signifikan dalam proses *recovery*. Kemampuan pemerintah dalam membangun rumah, misalnya, tidak dimiliki oleh Muhammadiyah. Kerjasama yang dibangun diharapkan dapat saling melengkapi antar kedua belah pihak dalam konteks penanggulangan bencana.

Aktor kedua yang tidak kalah penting adalah organisasi/LSM/lembaga lain yang bergerak pada bidang penanggulangan bencana. Dalam konteks Merapi, Muhammadiyah berupaya membangun jaringan dengan berbagai

lembaga/organisasi yang sama-sama bergerak dalam penanggulangan bencana. Masuknya MDMC dalam Forum Yogya merupakan salah satu bukti nyata Forum ini beranggotakan LSM-LSM bencana yang berada di wilayah Yogyakarta. Forum tersebut amat berguna dalam rangka tukar menukar informasi yang dimiliki antar anggota. Selain itu MDMC juga terlihat bekerjasama dengan berbagai lembaga kemanusiaan yang berlabel agama. Untuk membangun komunikasi yang intensif maka diadakan sebuah pertemuan yang diberi nama Humanitarian Forum. Selain sebagai sarana tukar informasi, forum ini juga digunakan sebagai sarana saling tolong menolong antar berbagai lembaga yang ada.

Selain lembaga yang beroperasi dalam lingkup nasional, ada beberapa lembaga donor atau LSM internasional yang juga menjalin kerjasama dengan MDMC. Pada umumnya kerjasama lembaga asing memberikan bantuan berupa dana atau logistik kepada Muhammadiyah dan kemudian didistribusikan kepada yang membutuhkan atau digunakan untuk menjalankan program yang dirancang oleh MDMC. Tercatat ada tiga lembaga yang terlibat kerjasama dalam konteks Merapi, yaitu AUSAID yang membantu pendanaan program recovery pendampingan terpadu yang disebut *People Kampong Organization*, Direct Relief Internasional yang membantu obat-obatan, dan World Vision yang membantu logistik. Posisi MDMC sendiri terhadap kerjasama dengan berbagai lembaga internasional yang berasal dari latar belakang keagamaan berbeda seperti World Vision, yang merupakan lembaga Katolik internasional, jalinan kerjasama didasarkan atas sebuah kesepakatan yang disetujui bersama. Jadi jelas bahwa MDMC mau bekerja sama dengan siapa saja dengan dasar kesepakatan yang disepakati bersama.

c. Peran Central MDMC dalam Jejaring

MDMC selaku lembaga yang diserahi wewenang dari PP Muhammadiyah sebagai koordinator penanggulangan bencana memiliki posisi yang kuat. Dua buah strategi dijalankan MDMC dalam upayanya mensukseskan pelaksanaan program-program yang dirancangnya. Pertama adalah secara struktural. Menurut peraturan pendirian MDMC semestinya dalam kepengurusan di wilayah (provinsi) dan Daerah (Kabupaten) terdapat MDMC yang fungsinya menghubungkan MDMC pusat dengan wilayah di bawahnya. Akan tetapi karena sebagian MDMC belum terbentuk maka cenderung sulit melakukan kerjasama dalam bentuk komando kepada kepengurusan di daerah. Sebuah langkah ekstra ditempuh MDMC dengan cara "mengontak" Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar mengeluarkan instruksi yang dibutuhkan MDMC kepada berbagai lembaga yang berada dalam lingkup Muhammadiyah. Langkah ini dijelaskan oleh Pengurus MDMC Pusat, Boy:

...Apabila ada rumah sakit-rumah sakit yang sudah pernah turun ke lokasi bencana, maka kami tinggal kontak direktur setempat. Tetapi pada yang belum pernah turun ke lokasi bencana, maka kami lakukan secara struktural. Sama halnya dengan bantuan relawan universitas, kami juga melakukan mekanisme struktural. Dan pada kasus Merapi ini relawan universitas tersebut dianggap sedang kuliah (KKN).¹⁸

Contoh yang dilakukan dalam konteks Merapi ini adalah mengenai kebutuhan relawan, dimana PP menginstruksikan pada UAD untuk "meminjamkan" mahasiswanya.

Cara kedua yang dilakukan lebih kepada pendekatan personal, seperti jika MDMC membutuhkan relawan maka ia mendayagunakan jejaring pertemanan di kalangan mahasiswa. Mahasiswa yang menjadi bagian dari jejaring tersebut direkrut dan dimasukkan dalam bagian penanggulangan MDMC. Cara ini dapat dikatakan non struktural jika dilihat dari tidak adanya penggunaan instruksi dari PP. Namun dengan penggunaan cara ini MDMC juga melakukan langkah-langkah lanjutan, seperti melobi rektorat agar memberikan ijin dan keringanan sehingga mahasiswa tidak merasa terbebani dengan persoalan akademik.

3. Manifestasi Bekerjanya Jejaring: Kerajinan dari Bahan Salak

Salah satu aspek dari pendampingan terpadu yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah pemberdayaan ekonomi. Konsep pemberdayaan ekonomi ini amatlah penting dalam konteks recovery karena banyak dari warga yang mata pencaharian sehari-harinya rusak. Apabila permasalahan ini tidak diatasi dapat menimbulkan permasalahan baru yang dapat menghambat pemulihan paska bencana. Pemberdayaan ekonomi menjadi kunci permasalahan ini, sebagaimana yang diungkapkan pengurus MDMC Pusat, Boy:

...Misalkan mereka memiliki usaha salak namun rusak karena bencana, maka otomatis mereka tidak memiliki sumber penghasilan lagi. Jika dijual harganya jatuh, terlebih lagi salak itu masa panennya lama. Maka dari itu kami mencoba tawarkan alternatif usaha...¹⁹

Tercatat ada beberapa pendampingan yang dilakukan Muhammadiyah di beberapa titik di Sleman. Pemberdayaan ini dilakukan dengan memperhatikan potensi lokal yang ada di daerah tersebut sehingga diharapkan warga dengan mudah menerima program tersebut.

¹⁸ Wawancara dengan Boy, pengurus MDMC Pusat, Selasa 4 Januari 2011

¹⁹ Wawancara dengan Boy, pengurus MDMC Pusat, Selasa 4 Januari 2011

Salah satu program pemberdayaan ekonomi tersebut dilakukan di desa Jamblangan, Purwobinangun, Pakem, Sleman. Program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan di desa tersebut adalah Pengolahan hasil pertanian berupa kerajinan dari bahan salak. Pemilihan salak dilakukan mengingat desa tersebut banyak mempunyai kebun salak yang sangat potensial untuk diberdayakan. Paska erupsi Merapi, salak-salak yang berada di desa diperkirakan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal selama kurang lebih satu tahun. Guna menutupi kerugian yang diderita itulah MDMC melaksanakan program kerajinan salak.

Program ini sebenarnya merupakan pembekalan kepada warga mengenai bagaimana mendayagunakan salak sebagai barang kerajinan. Dimana pelaksanaannya dimulai dari inisiatif warga yang sebelumnya sudah mempunyai kelompok-kelompok warga. Kelompok ibu-ibu rumah tangga inilah yang kemudian berdiskusi dengan MDMC dan menghasilkan keputusan pembekalan kerajinan salak.

a. Strategi Mensukseskan Program

Sebagai salah satu program yang terangkum dalam pendampingan terpadu, program ini juga melibatkan berbagai lembaga yang bernaung di bawah Muhammadiyah. Program ini paling tidak dibagi menjadi tiga tahapan. Pertama adalah pembentukan kelompok dan motivasi usaha. Dalam fase ini perwakilan warga diajak oleh MDMC untuk menghadiri semacam workshop. Menariknya dalam training tersebut warga juga diperkenalkan mengenai cara penanggulangan bencana sekaligus dilaksanakan penghilangan trauma oleh tim psiko-sosial. Harapannya ketika wakil tersebut pulang ke daerahnya dia akan mampu menularkan semangat barunya yang optimis dalam menjalani hidup paska gempa dan juga dapat menyebarkan informasi terkait kebencanaan. Hal ini sebenarnya menunjukkan ada upaya serius pengintegrasian *risk reduction* pada program recovery terkhusus pada ibu-ibu yang bisanya tergolong kelompok rentan di desa karena keterbatasan informasi yang ia miliki.

Kedua, dilaksanakan pendampingan oleh tim-tim ahli yang akan diambilkan oleh MDMC dari MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat). MDMC mempunyai keyakinan bahwa harus para ahli yang diterjunkan ke masyarakat agar transfer informasi dan keterampilan berlangsung optimal, sebagaimana yang diungkapkan Koordinator MDMC di Desa Jamblangan, Udin: "Untuk program ini sudah ada pelatih khusus dari MPM. Jadi pendampingannya langsung dari MPM".²⁰

²⁰ Wawancara dengan Udin, Koordinator MDMC di Desa Jamblangan, Rabu 5 Januari 2011

Ketiga adalah pelimpahan kepada Pengurus Muhammadiyah di daerah tersebut. Fase ini dilakukan ketika warga sudah dirasa cukup pengetahuan dan keterampilannya. Pelimpahan ini dimaksudkan agar di masa yang akan datang akan terjalin hubungan warga-Muhammadiyah yang lebih erat, seperti dapat dilaksanakan pendampingan yang lebih komprehensif mengingat anggota persyarikatan tersebut merupakan warga yang mengetahui seluk beluk daerahnya.

b. Salak dan Ideologi Muhammadiyah

Pendampingan masyarakat dalam konteks ekonomi mikro sebenarnya menyimpan sebuah fakta penting mengenai pendampingan MDMC, yaitu implementasi ideologi Muhammadiyah. Semenjak fase pertama dari program berupa workshop sebenarnya telah dilakukan upaya penjaualan masyarakat dari keyakinan-keyakinan mistis dan berbau klenik melalui sadar bencana. Informasi yang terkait dengan cara-cara penanggulangan bencana, potensi bencana disampaikan secara ilmiah dan tidak menyertakan unsur wangsit atau sesajenan. Sehingga di masa yang akan datang warga dapat segera bereaksi apabila ada bencana dan tidak lagi berupaya lari kepada hal-hal berbau mistis.

Selain upaya mengembangkan rasionalisme warga, upaya pendampingan yang berkelanjutan tersebut sebenarnya merupakan manifestasi dari gerakan *Amar Ma'ruf nahi Munkar* yang dilakukan Muhammadiyah. Sebagaimana pandangan Muhammadiyah bahwa *Amar Ma'ruf nahi Munkar* harus terus menerus dilakukan, maka setelah warga dianggap mempunyai keterampilan selanjutnya akan didampingi oleh cabang persyarikatan di wilayah setempat. Harapannya akan tercipta hubungan yang lebih dalam antara warga dan Muhammadiyah sekaligus sebagai upaya menjaga keberlangsungan dakwah di daerah.

Kesimpulan

Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang telah berakar kuat di Indonesia tercatat telah melaksanakan berbagai program terkait *recovery* bencana. Paling tidak ada empat bagian yang menjadi perhatian utama Muhammadiyah yaitu bagian pendidikan, pendampingan warga melalui konsep *People Kampong Organization*, dan bidang keagamaan. Kesemua upaya ini sejatinya dimaksudkan agar warga kembali dapat hidup seperti sebelum terjadi bencana dan mencoba meningkatkan kehidupan warga dengan adanya adar bencana dan peningkatan pendapatan lewat pemberdayaan.

Melihat analisa data pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan penggunaan sebuah jaringan yang terkoneksi kuat mempunyai hasil yang signifikan dalam mensukseskan proses *recovery*. Muhammadiyah melalui MDMC sebagai pusat koordinasi menjadi bukti akan hal tersebut. Dimana hubungan

antar lembaga/majelis yang bernaung di bawah Muhammadiyah seperti Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Pendidikan Tinggi, atau organisasi otonom seperti IMM, IPM. dan lembaga-lembaga luar Muhammadiyah mampu dipersatukan demi mensukseskan *recovery*.

Sebuah kesimpulan menarik dapat diambil terkait penanggulangan bencana dan ideologi Muhammadiyah. Ternyata ideologi Muhammadiyah yang mendasarkan diri pada gerakan *tajdid* dan *Amar Ma'ruf nahi Munkar* amat mendominasi pelaksanaan penanggulangan bencana. Upaya serius dari PP Muhammadiyah dalam upaya penyuluhan sadar bencana melalui workshop pada proses *recovery* yang dapat dibaca sebagai upaya menjauhkan warga dari kepercayaan klenik dan mistik.

Selain *tajdid*, upaya penerapan *recovery* berbasis *risk reduction* ternyata telah coba diimplementasikan secara sistematis dalam program Muhammadiyah. Ini menunjukkan bahwa ada upaya serius dari Muhammadiyah dalam melaksanakan kovenan internasional. Penerapan *risk reduction* sejatinya merupakan terobosan yang sangat penting sehingga di masa yang akan datang kembali terjadi bencana maka diharapkan warga akan lebih siap.

Daftar Pustaka

Buku

Pasha, Musthafa Kamal dkk, 2000, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

Sazali, 2005, *Muhammadiyah dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Psap

Turner, Rachel S., *Neo-Liberal Ideology History, Concepts and Policies*, Edinburgh: Edinburgh University Press

Yin, Robert K., 2003, *Case Study Research Design and Method*, California: Sage Publications

Jurnal

Pratikno, "Good Governance dan Governability", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (Nomor 3, Volume VIII, Maret 2005)

Media Online

Brillantes, Alex B. "*Partnerships: A Key Pillar Of Good Governance*". Monograph: From Government to Governance, <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/EROPA/Monograph-WorldCOG-Chap6.pdf>, diakses tanggal 6 januari 2011

Eggers, William D dan Stephen Gold Smith, "*Government by Network The New Public Management Imperative*", A Joint Study by Deloitte Research and the Ash Institute for Democratic Governance and Innovation at the John F. Kennedy School of Government at Harvard University, [http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Ireland/Local%20Assets/Documents/ie_PS_governingbynetwork_1008\(1\).pdf](http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Ireland/Local%20Assets/Documents/ie_PS_governingbynetwork_1008(1).pdf) diakses tanggal 6 Januari 2011

_____, *Learning from Disaster Recovery Guidance for Decision Makers*, A Publication from the International Recovery Platform (IRP) Supported by the Asian Disaster Reduction Center (ADRC), International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) secretariat and United Nations Development Programme (UNDP), May 2007

"Muhammadiyah Korban 1000 Sapi untuk Korban Merapi", <http://www.padang-today.com/?mod=berita&today=detil&id=22995> diakses tanggal 20 Desember 2010

Wawancara

Wawancara dengan Ahmad Djam'an, Wakil Ketua MDMC Wilayah Muhammadiyah, Kamis 16 Desember 2010, dan Selasa tanggal 28 Desember 2010

Wawancara dengan Arif Nur, Liaison Officer MDMC, Jum'at 17 Desember 2010

Wawancara dengan Boy, pengurus MDMC Pusat, Selasa 4 Januari 2011

Wawancara dengan Udin, Koordinator MDMC di Desa Jamblangan, Rabu 5 Januari 2011